PEMBATALAN KEMENANGAN BUPATI SABU RAIJUA

NAMA : PIRDAUS

NIM : 10200120223

Abstracts :

Mahkama konsitusi membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua No.153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 september 2020, sepanjang pasangan Calon Nomor urut 2 (Otient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly). Keempat , MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021. MK pun memerintahkan termohon untuk meakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon Nomor urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan di ucapkan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konsitusi,menemukan fakta Hukum bahwa Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor. Dua paspor tersebut, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April sesuai dengan keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027.

Kata kunci : Pembatalan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua

A . Pendahuluan

• Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah berlalu, namu menyisahkan polemik salah satunya yaitu terkait temuan kasus kewarnanegaraab Orient P Riwu Kore selaku Bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diketahui bawaha status Oriet P Riwu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat. Hal tersebut terungkap setelah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menerima balasan surat elektronik dari kedutaan besar Amerika Serikat mengenai status kewarganegaraan Orietn P Riwu Kore . Namun menurut pengakuan dari Oriet P Riwu Kore dirinya adalah warga negara Indonesia (WNI) sah yang lahir di kota kupang 7 oktober 1965, bersekolah mulai SD hingga Perguruan Tinggi di kupang, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirinya resmi didatabase kependudukan pada diktorat jederal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) . Orietn P Riwu Kore juga mengakui dirinya pernah memiliki paspor Amerika Serikat ketika ia masih bekerja disana. Berdasarkan hal tersebut status kewarganegaraan Orient P Riwu Kore saat ini dalam penelitian Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan apakah dia masih WNI atau sudah menjadi WNA.

Pada pilkada di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu Pemilian Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi . Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat K abupaten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat kota. Disebutkan dalam ketentuan pasal 1

angka 1 UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi UU yang kemudian mengalami perubahan dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dalam ketentuan pasal 7 UU Pilkada, yaitu : “warganegara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat
4. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
5. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
6. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
8. menyerahkan daftar kekayaan pribadi
9. tidak memiliki tanggungan utang perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara
10. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
11. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
12. belum pernah menjabat sebagai gubernur selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, bupati, dan walikota
13. berhenti dari jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
14. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, bupati, dan walikota
15. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahan
16. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota kepada pimpinan dewan perwakilan daerah bagi anggota perwakilan daerah atau kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah bagi anggota daerah perwakilan rakyat
17. mengundurkan diri sebagai tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, dan
18. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon “

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU Pilkada dapat kita ketahui bahwa syarat mutlak bagi seorang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota adalah seorang warga negara Indonesia. Hal serupa juga dinyatakan

dalam ketentuan pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum No.1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga peraturan komisi pemilihan umum No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur . Bupati dan Wakil Bupati . Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 1/2020)

Dan Mahkamah konstitusi membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua No.153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 september 2020, sepanjang pasangan Calon Nomor urut 2 (Otient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly). Keempat , MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021. MK pun memerintahkan termohon untuk meakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon Nomor urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan di ucapkan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konsitusi, menemukan fakta Hukum bahwa Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor. Dua paspor tersebut, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April sesuai dengan keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027.

Seorang calon kepala daerah harus memahami aturan yang menjadi dasar calon kepala daerah.

- **Rumusan Masalah**

- 1. Apakah orang asing bisa menjadi kepala daerah ?**

Dalam daftar persyaratan pencalonan kepala daerah di indonesia tentunya harus memiliki syarat utama sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan sytaratnya hal ini penting untuk digaris bawahi, karena hal ini menyangkut loyalitas pengabdian sang pemimpin terhadap daerah yang tengah di pimpinnya kedepa. Jika syrata pertama di abaikan, dengan sendirinya, seorang yang berinsiatif mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah dibatalkan. Hal ini, tidak hanya berlaku bagi ketentuan terkait menjadi calon pemimpin. Syarat-syarat berlaku lain jika terkait tugas dan kewenangan di negara ini, pasti mengedepankan status kewarganegaraan.

Sejauh ini, pihak yang bertugas menangani persoalan ini masih melakukan pengolahan data dan evaluasi. Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) saat ini sudah membuat dialog dengan kementrian dalam negri. Dalam hal, pihak Bawaslu sudah menyampaikan dua keberatan. Bawaslu memita Kemendagri agar menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada tanggal 26 februari 2021, jika kewarganegaraan Orient P Riwu Kore belum jelas dan kedua, bawaslu meminta agar Kemendagri tidak melantik Orient karena masih menjadi warga negara Amrika Serikat.

Jika Orient memahami fakta cacat hukum sejak awal, Orient juga tidak perlu mencalonkan diri. Orient sendiri tahu soal status soal kewarganegaraannya yang masih menganggang. Jika Orient bijak, persyaratan-persyaratan berkaitan dengan pencalonan sudah pasti bisa dipahami dengan baik.

Dalam hal ini, kita mungkin bisa menayangkan Orient sendiri apakah ia sadar bahwa ia masih memiliki status kewarganegaraan ganda yang melekat padanya, sudah selayaknya ia mengurungkan niat untuk mencalonkan diri. Orient tentunya paham syarat-syarat seorang maju dalam kontestasi kepala daerah. Tak hanya Orient, tim KPU juga seharusnya paham mengenai syarat ini agar tak menjadi formalitas belaka.

Jika kita berpedoman pada huku yang berlaku (Undang – Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI), tentunya kita juga harus taat dalam menerapkan kebijakan hukum itu sendiri, semua ketentuan terkait apa saja di sekitar kita tentunya selalu bertali dengan hukum. Karena Orient belum memiliki status warganegara yang jelas, secara otomatis ia belum bisa diberi tanggung jawab penuh dalam mengurus tata kelola pemerintahan-konteks daerah Sabu Raijua. Penyelesaian kasus ini menjadi landasan hukum untuk kasus-kasus lain pada priode berikutnya.

Orang asing tidak bisa menjadi kepala daerah.

2. Mengapa MK memerintahkan KPU melakukan pemilihan ulang ?

Seperti diketahui, Mahkamah Konsitusi (MK) telah mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly di Pilkada sabu raijua Tahun 2020. Didiskualifikasi paslon No.urut 2 disebabkan karna syarat pencalonan Orient P Riwu Kore batal demi hukum karna yang bersangkutan terbukti adalah warga negara Amerika Serikat.

Mahkama Konsitu (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan surasa ulang dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Hal ini diputuskan dalam sidang putusan atas perkara yang diajukan oleh pasangan calon No.urut 3 yakni Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba “Memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan peungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua tahun 2020,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sudang yang disahkan secara daring,kamis (15/4/2021). MK tolak sengketa pilkada sabu raijua yang diajukan tiga pemohon namun,MK memutuskan pemungutan suara ualang tidak di ikut oleh pasangan calon No.urut 2 yakni Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly. Adapun pemungutan suara ulang hanya diikuti oleh pasangan No.urut 1 Nikodemus N Rih Heke dan Yohanis Uly Kale. Serta pasangan calon No.urut 3 Takem Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Sementara Orient dan Thobias didiskualifikasi oleh MK. “Memerintahkan pemungutan suara ualang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tengat wajtu 60 hari kerja sejak putusan diucapkan” . MK juga memerintahkan KPU dan Bawaslu RI untuk melakukan supervensi pelaksanaan pemungutan sura ulang, sedangkan untuk pemohon lainnya dari Takem-Herman yang di kabulkan MK dinyatakan ditolak.

MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang

3. Bagaimana sistem verifikasi KPU sabu raijua ?

Mahkamah Konsitusi (MK) meminta komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten sabu raijua mejelaskan peroses verifikasi pasangan calon dan tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) 2020. Agenda sidang sengketa hasil pilkada kali ini mendengarkan jawaban dari KPU Bawaslu dan pihak

terkait. Sementara yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah kewarganegaraan ganda Bupati sabu raijua terpilih Orient P Riwu Kore. MK meminta kuasa hukum KPU Kabupaten sabu raijua. Bahas dua kewarganegaraan awalnya pihak kuasa hukum KPU sabu raijua yang diwakili oleh Josua Victor mengatakan pihaknya akan menyampaikan gambaran pelaksanaan tahap pilkada Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua. Tahapan itu dimulai dari tahap pendaftaran, penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kemudian tahap rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua terpilih. “Bahwa seluruh rangkaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua mulai dari tahap pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua tahap verifikasi dan seterusnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.”kata Josua dalam sidang MK yang disiarkan secara daring, Senin (15/3/2021). Sidang sengketa pilkada, pemohon minta MK batalkan penetapan bupati sabu raijua terpilih namun dalam pemaparan tersebut Josua hanya menyampaikan argumen KPU terkait permohonan dari pemohon No.urut 1 Nikodemus N Rihi Neke dan Yohanis Uly Kale. Begitu pula dengan kuasa hukum KPU lainnya. Sudwijayanti. “tadi dikatakan akan dijelaskan apa yang dilakukan oleh KPU ketika verifikasi pasangan calon, koo tidak diuraikan, itukan harus diuraikan karena kan dari situ mau dirujuk semuanya ini.” ujar Hakim MK Saldi Isra. “jangan melompat ke peristiwa yang terjadi beberapa bulan kemudia.” ucap dia. Kemudian sidang dilanjutkan untuk mendengar kronologi tahapan pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati sabu raijua Tahun 2020. Pemohon curiga KPU tidak cermat soal kewarganegaraan Orient P Riwu Kore dalam sidang sebelumnya, pihak Nikodemus – Yohanis meminta MK membatalkan keputusan penetapan hasil rekapitulasi suara yang menyatakan Orient P Riwu Kore terpilih sebagai Bupati sabu raijua tahun 2020. Selain itu dinilai telah melanggar keputusan KPU NO.1 Tahun 2020 pasal 1 butir 18, serta menetapkan pemohon sebagai pemenang bupati dan wakil bupati sabu raijua.

KPU lalai dalam proses verifikasi pendataan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

B . Metode Penelitian

• Jenis Penelitian

Penelitian yang saya lakukan mengumpulkan berbagai artikel tentang permasalahan yang terjadi pada pembatalan kemenangan bupati dan wakil bupati sabu raijua

• Metode penelitian

- Bagaimana aturan verifikasi KPU
- Alasan MK membatalkan kemenangan Bupati terpilih
- Pengawasan Bawaslu
- Putusan MK memerintah KPU melakukan Pemungutan suara ulang

• Metode pengumpulan data

- Google
- Artikel dan
- Jurnal

• Teknik analisis

Mengumpulkan data tentang permasalahan yang terjadi pada pembatalan Bupati sabu rajua dan mengaikan berbagai putusan-putusan yang di keluar kan MK dan arahan MK untuk pemilihan ulang

D . Pembahasan

Kasus yang terjadi pada Pilkada kabupaten sabu rajua karna Orietn P Riwu Kore memiliki paspor warganegara Amerika serikat berdasar dari aturan dan berbagai persyaratan yang berlaku Pada pilkada di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi . Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat K abupaten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat kota. Disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi UU yang kemudian mengalami perubahan dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dalam ketentuan pasal 7 UU Pilkada, yaitu : “warganegara indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon gubernur, calob bupati dan wakil bupati, serta walokota dan wakil walikota adalah yang memiliki persyaratan sebagai beriku:

19. bertakwa kepada tuhan yang maha esa
20. setia kepada pancasila undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, dan negara kesatuan republik indonesia
21. berpendidikan paling renda sekolah lanjut tingkt atas atau sederajat
22. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
23. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
24. tidak pernah di jatuhi hukuman penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuata hukum tetap karna telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih
25. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
26. menyerahkan daftar kekayaan pribadi
27. tidak memiliki tanggungan utang perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara
28. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
29. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
30. belum pernah menjabat sebagai gubernur selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur , bupati , dan walikota
31. berhenti dari jabatan gubernur dan wakil ubernur , bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
32. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur , bupati , dan walikota
33. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahan
34. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur , wakil gubernur , bupati , wakil bupati, walikota, wakil walikota kepada pimpinan dewan perwakilan daerah bagi anggota

perwakilan daerah atau kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah bagi anggota daerah perwakilan rakyat

35. mengundurkan diri sebagai tentara nasional indonesia, kepolisian negara indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon , dan
36. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon “

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 UU Pilkada dapat kita ketahui bahwa syarat mutlak bagi seorang untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati , Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota adalah seorang warga negara Indonesia. Hal serupa juga dinyatakan dalam ketentuan pasal 4 peraturan komisi pemilihan umum No.1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga as a peratiran komisi pemilihan umum No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur . Bupati dan Wakil Bupati . Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 1/2020) . Bupati Sabu Raijua cacat hukum karna Orient P Rewu Kore memiliki kewarganegaraan ganda. Dan ditelusuri putusan MK Dan Mahkamah konsitusi membatalkan keputusan KPU Sabu Raijua No.153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 september 2020, sepanjang pasangan Calon Nomor urut 2 (Otient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly). Keempat , MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021. MK pun memerintahkan termohon untuk meakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon Nomor urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan di ucapkan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konsitusi, menemukan fakta Hukum bahwa Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor. Dua paspor tersebut, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April sesuai dengan keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027.

1. Undang – undang WNI tidak boleh berkewarganegaraan ganda

Dalam Undang – Undang , WNI dilarang memiliki kewarganegaraan ganda. Pada pasal 23 Undang – Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan menjelaskan hal apa saja yang dapat menghilangkan status WNI seseorang. Salah satunya jika orang tersebut telah menjadi warga negara lain atau kemauannya sendiri. Pasal 23 Undang – Unang kewarganegaraan terdiri dari huruf A sampai I . Berikut bunyi ke 9 poin di pasal 23 yang menjadikan seseorang tak lagi berstatus WNI.

Pasal 23

a . memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauanny sendiri.

b . tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.

c . dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun lalu sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

d . masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.

e . secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia

f . secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

g . tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

h . mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau.

i . bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus – menerus bukan dalam rangka dinas , tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dari penjabaran peraturan mengenai kewarganegaraan seorang kepala daerah tidak boleh memiliki warga negara ganda.

warga negara Indonesia tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda

2. Peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarga negaran RI sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2006 untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 undang – undang dasar 1945, dibuatlah undang – undang pelaksanaan, yakni undang – undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 agustus 1945 sampai sekarang undang – undang mengenai kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1 . Undang – undang No. 3 tahun 1946 tentang warganegara dan penduduk Indonesia undang – undang No. 3 tahun 1946 disetujui bersama oleh pemerintah dengan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KINP) dan diundangkan pada tanggal 10 april 1946. Namun pada tanggal 27 februari 1947, pemerintah RI dengan persetujuan KNIP mengeluarkan undang- undang No. 6 tahun 1947 tentang perubahan undang – undang No. 3 tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Undang – undang No.3 tahun 1946 jo undang – undang No. 6 tahun 1947. Menurut pasal 1 undang – undang No.3 tahun 1946 penjelasan tentang siapakah warga negara Indonesia (Winarno, hal. 108 – 114)

2 . undang – undang No.2 tahun 1958 tentang persetujuan antara RI – RRT mengenai dwikewarganegaraan untuk menentukan pilihannya, apakah ia akan melepaskan kewarganegaraan RRC dan menjadi warganegaraan indonesia, atau tetap menjadi warganegara RRC dengan kehilangan kewarganegaraan indonesia. Kewajiban memilih itu hanya di bedakan kepada orang dewasa (telah berumur 18 tahun atau pernah kawin). Pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan dengan menyatakan kepada petugas – petugas negara, kewarganegaraan mana, dengan disertai surat- surat keterangan diri serta keluarga. Anak – anak yanf belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun setelah mereka dewasa. Bagi dwi- kewarganegaraan yang dewasa tidak menyatakan pilihannya dalam waktu 2 tahun berlaku dengan ketentuan.

3 . undang – undang No. 62 tahun 1958 tentang kewrganegaraan indonesia undang – undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan indonesia (Lembaga negara tahun 1958 nomo 113) mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 agustus 1958. Beberapa bagian dari undang – undang ini, yaitu mengenai ketentuan – ketentuan siapa yang menjadi warga negara indonesia, status anak dan cara – cara kehilangan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surat tanggal 27 september 1949. Dasar hukum dari undang – undang ini adalah UUD S tahun 1950 khususnya pasal 5 dan 14 UUDS

4 . undang – undang no. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU no. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Inonesia pasal 17 huruf K UU no. 62 tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warga negara RI yang bertempat tinggal di luar negri lain dari pada untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara RI dalam jangka 5 tahun yang pertama dan selanjutnya untuk siap 2 tahun. Dalam masa itu tidak semua warga negara RI yang tinggal di luar negri dapat memenuhi kewajiban tersebut bukan karena kelalaian melainkan akibat dari keadaan di luar negri kesalahannya, sehingga ia terpaksa dia tidak menyatakan keinginannya tersebut tepat pada waktunya karena pasa 18 tidak menampung orang – orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan bertahap pasal 18 UU no. 62 tahun 1958. Adapun yang mengenai orang yang berhak menggunakan kesempatan pasal 18 ayatb 2 adalah orang – orang yang pada waktunya mulai berlakunya UU NO. 62 Tahun 1958 adalah warga negara RI dan selama ini menunjukkan kesetiaannya kepada negara RI. Dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing, mereka yang tanpa kewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan RI atau mereka yang telah memilih menjadi warga negara dari negara lain, tidak dapat menggunakan kesempatan ini.

Istilah kewarganegaraan menurut ketentuan UU NO. 12 tahun 2006 adalah segala ikhwil yang berhubungan dengan warga negara (pasal 1). Oleh kewarganegaraan, maka kewarganegaraan mencakup hal- hal, antara lain

1. penentuan tentang siapa saja yang termasuk warga negara
2. cara menjadi warga negara atau pewarganegara
3. tentang kembali kewarganegaraan yang hilanh.

adapun ketentuan pokok yang diatur dalam UU NO. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut.

1. tentang siapa yang menjadi warga negara indonesia
2. tentang syarat dan kata cara memperoleh kewarganegaraan RI
3. tentang kehilangan warganegara RI
4. tentang syarat dab tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan RI

5. tentang ketentuan pidana

secara umum dalam undang – undang dinyatakan bahwa menjadi WNI adalah orang – orang bangsa indonesia asli dan orang – orang lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warganegara (pasal 2). yang dimaksud dengan orang-orang bangsa indonesia asli, adalah orang indonesia yang menjadi warganegara negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warganegara lain atas kehendaknya sendiri. Sedangkan isi dari UU NO. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut .

1. tentang siapa warga negara indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara indonesi termasuk dalam pasal 4 atau winarno, hal. 128-130
2. tentang cara memperoleh kewarganegaraan RI, menurut undang- undang unu dapat dilakukan dengan :
 - melalui permohonan (pasal 8-9)
 - melalui pernyataan (pasal 19)
 - melalui pemberian kewarganegaraan (pasal 20)
 - melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaraan(wainarno, ha. 131-132
3. tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaraa RI hilang, jika bersangkutan : (pasal 23) atau winarno, hal. 132-136)

Dalam daftar persyaratan pencalonan kepala daerah di indonesia tentunya harus memiliki syarat utama sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan sytaratnya hal ini penting untuk digaris bawahi, karena hal ini menyangkut loyalitas pengabdian sang pemimpin terhadap daerah yang tengah di pimpinnya kedepa. Jika syrata pertama di abaikan, dengan sendirinya, seorang yang berinsiatif mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah dibatalkan. Hal ini, tidak hanya berlaku bagi ketentuan terkait menjadi calon pemimpin. Syarat-syarat berlaku lain jika terkait tugas dan kewenangan di negara ini, pasti mengedepankan status kewarganegaraan.

Peraturan kewarganegaraan indonesia

3. Paca – putusan MK, KPU evaluasi PKPU Pencalonan Pilkada

Pada saat MK melakukan rapat secara daring, pada saat itu Mahkamah Konsitusi mengeluarkan putusan tentang sengketa Pilkada Sabu Raijua, Nusa tenggara timur, akan dijadikan hahan evaluasi dan penyempurnaan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan kepala daerah. Hal ini dilakukan atau kejadian lolosnya warga negara asing calon kepala daerah tidak kembali terulang. Anggota komisi pemilihan umum (KPU), I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi, di Jakarta, jumat (16/4/2021), mengatakan, KPU akan mencermati putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait perselisihan hasil pilkada sabu raijua yang mengidentifikasi pasangan Orient P Riwu Kore – Thobias Uly. Jika dalam evaluasi ditemukan ada permasalahan dalam implementasinya, PKPU Nomor 1 tentang pencalonan pilkada akan direvisi.

Kajian terhadap dua putusan itu, yakni sabu raijua dan boven digoel, menjadi bahan pertimbangan hukum untuk menyempurnakan PKPU agar kejadian di kedua daerah tidak terulang di pilkada mendatang.

Saat ini, biro pengaturan perundang – undangan KPU juga tengah mengkaji putusan Mahkamah Konsitusi terkait sengketa pilkada perselisihan hasil pilkada boven digoei. Kajian terhadap dua putusan itu, yakni sabu rajua dan boven digoei, menjadi bahan pertimbangan hukum untuk menyempurnakan PKPU agar kejadian di kedua daerah tidak terulang di pilkada pendatang.

“Menuju pemilu dan pilkada serentak 2024, kami masih memiliki sedikit waktu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan PKPU, termasuk PKPU tentang pencalonan pilkada, karena aturan perundang-undangan yang di gumanakan masih sama.” kata Raka.

Putusan MK tentang pilkada sabu rajua, lanjut dia menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan peserta agar semakin jujur dan terbuka memberikan dokumen administrasinya. Sebab, dalam perosesnya, KPU dinilai telah melaksanakan tahapan sesuai regulasi yang ada. “Selain penyempurnaan peraturan, kejujuran, dan keterbukaan masing – masing pihak terkait pencalonan sangat penting agar praktik pilkada sebagai praktik krtatanegaraan bisa berjalan baik”. Undang – undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan mesih mengasumsikan semua bakal calon yang mendaftar warga negara indonesia.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Handar Nafis Gumay, menilai undang – undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang prncalonan masih mengasumsikan semua bakal calon yang mendaftar adalah warga negara indonesia. Kedua atura ini tidak secara spesifik mengantisipasi adanya warga negara asing yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pasal 7 pilkada hanya disebutkan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Adapun pasal 4 PKPU tentang pencalonan kepala daerah menggunakan frasa semua calon kepala daerah adalah warga negara indonesia yang memenuhi sejumlah persyaratan. Di dalam persyaratan tersebut, tida ada satu pun syarat yang bisa memastikan seluruh kandidat merupakan warga negara indonesia.

“Dengan demikian, tidak ada mekanisme pengecekan kewarganegaraan selain dari dokumend kartu tanda kependudukan elektronik yang memuat kolom kewarganegaraan”

Oleh karna itu, perbaikan aturan pencalonan perlu segera dilakukan, KPU bisa mengubah PKPU tentang pencalonan tanpa perlu menggunakan perubahan UU pilkada, salah satunya menambah syarat warga negara indonesia dalam surat pernyataan bakal calon kepala daerah.”Pertanyaan kewarganegaraan sebagai salah satu syarat pencalonan membuat KPU harus melakukan pengecekan dan mengakibatkan bakal calon untuk jujur mengenai status kewarganegaraannya. Jika saat pengecekan ternyata tidak sesuai, bakal calon bisa tidak memenuhi syarat sekaligus bisa di jerat pidana karena menyampaikan informasi palsu”. Dalam peroses verifikasi kewarganegaraan calon, KPU perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Luar Negri.

“seluruh nama bakal calon kepala daerah dilakukan pengecekan kewarganegaraan melalui kedutaan besar untuk memastikan bahwa seluruh yang mendaftar adalah warga negara indonesia”

Bupati terpilih kabupaten sabu rajua, Nusa Tenggara Timur, Orient P Riwu Kore menjawab pertanyaan majelis hakim panel Mahkamah Konsitusi Suhartoyo dalam sidang sengketa hasil pilkada Kabupaten Sabu Rajua, senin (15/3/2021). Orient hadir sebagai pihak terkait melalui telekonferensi. Seperti dikabarkan sebelumnya, MK dalam putusan, Kamis (15/4/2021). Membatalkan penetapan Orient dan pasangannya, Thobias Uly, sebagai bupati dan wakil bupati

terpilih Sabu Raijua. Selain itu, MK memutuskan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Orient – Tobias.

Putusan itu dijatuhkan karena Orient melanggar aturan kewarganegaraan, Orient berkewarganegaraan Amerika Serikat. Padahal syarat pencalonan di pilkada mengharuskan calon kepala daerah berkewarganegaraan Indonesia.

KPU evaluasi PKPU Pencalonan Pilkada

4. Status warga negara Orient tidak boleh dilantik sebagai Bupati

Kita menyayangkan dan sangat kecewa terhadap polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pilkada 2020 yang lalu, IEW mengungkapkan, kasus kel pertama terjadi. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi juga sudah pernah keliru dengan melantik Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yang saat itu mengantongi paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

“Pemrintah dengan segala sumber hukumnya harusnya belajar dari kejadian tersebut”

Karenanya, IEW menilai bahwa, terpilihnya Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua bukti nyata Indonesia tidak pernah belajar dan tidak pernah berbenah dari kejadian masa lalu. Kemnenterian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengklarifikasi langsung kepada Orient Riwu Kore, Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT berdasarkan pengakuan, Orient pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS) tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Direktur Jenderal Kependudukan (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, klarifikasi dilakukan setelah menjadi berbincangan publik status kewarganegaraan Orient Riwu Kore. Karena diduga cacat sebagai warga negara AS.

Sedangkan berdasarkan koordinasi dengan Kemenkumham bahwa, status kewarganegaraan Orient masih dalam pengkajian untuk menentukan bahwa yang bersangkutan masih WNI atau sudah menjadi WNA.

IEW mengaku turut mengamati dan menilai bahwa, yang dilakukan penyelenggara sudah dianggap baik dan sesuai. KPU Sabu Raijua bahkan melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang mengenai keabsahan KTP Orient seperti yang di pertanyakan Bawaslu tersebut.

Bahkan, apresiasi juga harus kita berikan kepada Bawaslu yang tentu saja langkah bijak dengan mengirim surat kepada kedutaan AS pada tanggal 15 September 2020, perihal permohonan informasi data kewarganegaraan Orient. “ Kita minta kepada Kemendagri atau Pemprov NTT jika Orient P Riwu Kore terbukti memiliki kewarganegaraan Pamansam, maka tidak boleh ad pelantikan terhadap dirinya. Kenapa? karena memang tidak sah dia (Orient) sebagai kandidat pilkada.” Pihak menyebutkan, pasal 7 undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada dengan jelas menyebutkan syarat utama bisa menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia (WNI). Karenanya, meski Orient P Riwu Kore telah terpilih, tetapi IEW meminta tidak boleh dilakukan pelantikan, karena hal tersebut mencoreng martabat bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.”

Hal ini karena, Indonesia tidak menganut dwi – kewarganegaraan, itu jelas, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 undang- undang kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006. Kemudian, seseorang kehilangan statusnya sebagai WNI apanilah telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri dan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau baguan dari negara asing tersebut. Dia juga menyebutkan, jika mengacu pada pasal 9 UU 12 tahun 1006, seseorang harus mengajukan permohonan kembali sebagai WNI pada saat sudah bertempat tinggal di indonesia selama lima tahun berturut –turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

Meski banyak pakar hukum yang mrngatakan bahwa Orient P Riwu Kore tetap bisa dilantik dan kemudian langsung dihentikan, namun IEW mengacu pada pasal 164 ayat 4 undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, bahwa calon kepala daerah tidak bisa di lantik karena meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Karena, apa yang sudah dilakukan Orient merupakan sebuah pelanggaran administrasi kewarganegaraan yang mencakum serius, maka bisa ia dianggap berhalangan tetap dan tidak dilantik sesuai peraturan tersebut. Meski begitu, hasil pemilu tetap sah san tidak dilakukan pemungutan suara ulang. Sebab,pasangan Orient, yakni wakil Bupati terpilih sabu rajjua, Thobias Uly tetap memenuhi syarat dan boleh dilantik.

“Tetapi , kejadian ini harus diselesaikan oleh semua pihak yang bertanggung jawa, tidak hanya KPU dan Bawaslu sebaai penyelenggara, namun juga pemerintah (DiSdukcapil, Kemendagri, Kemlu, Kemenkumham, dll) terhadap tertib administrasi kependudukan di indonesia.”

Menurut Undang – undang trsebut trdapat pidana penjara dan sanksi 3 tahun dan 6 tahun jika memang terbukti memberikan keterangan palsu atau tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah – olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang di perlukan bagi persyaratan intuk menjadi Calon Bupati.

status kewarganegaraan Orinet P Rieu Kore masih dalam penyelidikan

E . Kesimpulan

Kasus yang terjadi pada Pilkada kabupaten sabu rajjua karna Orietn P Riwu Kore memiliki paspor warganegara Amerika serikat berdasar dari aturan dan berbagai persyaratan yang berlaku Pada pilkada di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi . Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tingkat K abupaten dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat kota. Disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi UU yang kemudian mengalami perubahan dalam UU No.8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan dalam ketentuan pasal 7 UU Pilkada.

Dalam daftar persyaratan pencalonan kepala daerah di indonesia tentunya harus memiliki syarat utama sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan syaratnya hal ini penting untuk digaris bawahi, karena hal ini menyangkut loyalitas pengabdian sang pemimpin terhadap

daerah yang tengah di pimpinnya kedepa. Jika syarat pertama di abaikan, dengan sendirinya, seorang yang berinisiatif mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah dibatalkan. Hal ini, tidak hanya berlaku bagi ketentuan terkait menjadi calon pemimpin. Syarat-syarat berlaku lain jika terkait tugas dan kewenangan di negara ini, pasti mengedepankan status kewarganegaraan.

Putusan MK tentang pilkada sabu rajua, lanjut dia menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan peserta agar semakin jujur dan terbuka memberikan dokumen administrasinya. Sebab, dalam prosesnya, KPU dinilai telah melaksanakan tahapan sesuai regulasi yang ada. “Selain penyempurnaan peraturan, kejujuran, dan keterbukaan masing – masing pihak terkait pencalonan sangat penting agar praktik pilkada sebagai praktik krtatanegaraan bisa berjalan baik”. Undang – undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan masih mengasumsikan semua bakal calon yang mendaftar warga negara indonesia.

Kita menyayangkan dan sangat kecewa terhadap polemik status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pilkada 2020 yang lalu, IEW mengungkapkan, kasus kel pertama terjadi. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi juga sudah pernah keliru dengan melantik Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yang saat itu mengantongi paspor Amerika Serikat sejak tahun 2012.

F . Daftar Pustaka

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011379372/polemik-warga-amerika-serikat-jadi-bupati-terpilih-di-ntt-kinerja-kpu-dikritisi>

<https://www.jpnn.com/news/bupati-sabu-raijua-terpilih-orient-p-riwu-kore-saya-wni-sah>

<https://nasional.tempo.co/read/1430361/orient-riwu-kore-mengaku-ikut-pilkada-sabu-raijua-karena-amanat-orang-tua/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/1429422/bupati-sabu-raijua-terpilih-berstatus-wna-pdip-kalau-benar-kami-kecolongan/full&view=ok>

<https://kumparan.com/kristianto-naku/pelantikan-bupati-orient-riwu-kore-dicegal-status-kewarganegaraan-1vF7xtlmwob>

<https://www.beritasatu.com/nasional/761285/kpu-siap-lakukan-pemilihan-suara-ulang-bupati-sabu-raijua>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/16564081/mk-perintahkan-kpu-gelar-pemungutan-suara-ulang-pilkada-sabu-raijua-tanpa>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/11230481/sengketa-hasil-pilkada-mk-minta-kpu-sabu-raijua-jelaskan-proses-verifikasi?page=2>

<https://news.detik.com/berita/d-3274681/uu-wni-tak-boleh-berkewarganegaraan-ganda>

<https://dwiyoungjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonnesia/>

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/16/pascaputusan-mk-kpu-evaluasi-pkpu-pencalonan-pilkada?status_register=register&status_login=login

<https://www.lead.co.id/status-warga-as-iew-orient-tidak-boleh-dilantik-sebagai-bupati/>